

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Partisipasi yang berlaku pada masyarakat kita masih belum diartikan secara universal, para perencana pembangunan mengartikan partisipasi sebagai dukungan terhadap rencana atau proyek pembangunan yang direncanakan dan ditentukan oleh pemerintah. Ukuran partisipasi masyarakat diukur oleh berapa besar sumbangan yang diberikan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uang maupun tenaga yang diberikan kepada pemerintah. Partisipasi yang berlaku secara universal adalah kerja sama yang erat antara perencanaan dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Dikaitkan dengan mutu pendidikan partisipasi masyarakat hadir dengan adanya dewan komite di setiap satuan lembaga pendidikan. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

Komite sekolah berdasarkan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 044/U/2002 komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur luar pendidikan sekolah.

Pengelolaan komite sekolah baik dari proses perencanaan hingga evaluasi di SMA Negeri dan Swasta tentunya memiliki kesamaan juga perbedaan. pengelolaan komite tergantung dari hasil keputusan bersama antara dewan komite yang ada dimasing-masing sekolah, dan mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan mutu pendidikan.

Di dalam pendidikan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Di sekolah masyarakat dapat menjadi tumpuan atas peningkatan dan pelayanan mutu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tetapi pada dewasa ini, masih banyak penyelenggaraan pendidikan yang masih mengesampingkan partisipasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pendidikan di masa sekarang ini, menuntut adanya partisipasi masyarakat yang maksimal.

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003, pada salah satu misinya dijelaskan agar memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan atau Komite Sekolah.

Keberadaan Komite Sekolah harus menjadi kekuatan dan faktor pendorong terbentuknya Komite Sekolah yang efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila kepala sekolah mampu menggandeng Komite Sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan serta menilai program-program sekolah.

Adanya pembentukan Komite Sekolah, masyarakat akan merasa memiliki sekolah. Di sisi lain, sekolah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap birokrasi pemerintah. Birokrasi tersebut dapat mengurangi berbagai tindakan intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap sekolah. Jika terlalu sering mendapat intervensi sekolah tidak dapat bergerak leluasa untuk membuat suatu perubahan dan program.

Maka dari itu setiap sekolah perlu adanya pengelolaan yang baik terhadap komite sekolah. Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya, Komite Sekolah harus menyusun program kerja atau sebuah perencanaan program atau dalam hal ini Komite Sekolah membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah program, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah agar tujuan dibentuknya komite Sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Belajar dari berbagai pengalaman dan juga kenyataan-kenyataan di lapangan, ternyata mengimplementasikan konsep Komite Sekolah tidak mudah. Kesulitannya bukan bersumber pada tataran konsep yang kurang jelas, melainkan lebih-lebih oleh karena budaya berorganisasi di kalangan masyarakat belum berkembang, apalagi organisasi untuk mengurus lembaga pendidikan yang bersifat non profit ini. Sebagai tindak lanjut Surat

Keputusan Mendiknas tentang Komite Sekolah itu telah dilakukan kegiatan sosialisasi maupun penyusunan berbagai pedoman operasional pelaksanaannya.

Berdasarkan konsep diatas jika dilihat dalam kenyataan yang ada di lapangan pengelolaan komite sekolah di SMA Negeri dan swasta memiliki perbedaan yang cukup tinggi, seperti berdasarkan hasil observasi pada tanggal 15 januari 2019 di SMA Muhammadiyah Tolangohula peran dewan komite dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*), sebagai badan pendukung (*supporting agency*), sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) dan sebagai badan penghubung (*mediator agency*). Sedangkan di SMA Negeri 01 Tolangohula dari pihak komitenya sudah berjalan dengan baik dalam menjalankan tupoksi dalam meningkatkan pendidikan disekolah tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas sangat jelas terlihat fungsi komite di sekolah negeri dan swasta memiliki perbedaan. Maka dari itu untuk melihat perbedaan pengelolaan komite sekolah di SMA Negeri dengan Swasta peneliti mengangkat judul yaitu “Studi Komparatif Pengelolaan Komite Sekolah Di SMA Negeri dan Swasta di Boliyohuto Raya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana fungsi komite sekolah di SMA Negeri di Boliyohuto Raya ditinjau dari fungsi komite : sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung ?

2. Bagaimana fungsi komite sekolah di SMA Swasta di Boliyohuto Raya ditinjau dari fungsi komite : sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung ?
3. Bagaimana perbedaan fungsi komite sekolah di SMA Negeri dan SMA Swasta di Boliyohuto Raya ditinjau dari fungsi komite : sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menyimpulkan tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui fungsi komite sekolah di SMA Negeri di Boliyuhuto Raya ditinjau dari fungsi komite : sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung.
2. Untuk mengetahui fungsi komite sekolah di SMA Swasta di Boliyuhuto Raya ditinjau dari fungsi komite : sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung.
3. Untuk mengetahui perbedaan fungsi komite sekolah di SMA Negeri dan SMA Swasta di Boliyohuto ditinjau dari fungsi komite : sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi kepala sekolah dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

2. Bagi dewan komite sekolah dapat menambah pengetahuan mengenai pentingnya keterlibatan dewan komite sekolah dengan kegiatan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
3. Bagi orang tua/wali siswa dapat menambah pengetahuan mengenai sinergi para orang tua didalam komite sekolah untuk mencapai keberhasilan program sekolah yang telah disusun sedemikian rapi.